

Acc 26/23
62

**PENGARUH BUDAYA MASYARAKAT DAN KONDISI SOSIAL EKONOMI
TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PENCEGAHAN
PERKAWINAN ANAK DI KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO**

Ayu Ansyari Triana, Titik Djumiarti, Ida Hayu Dwimawanti
Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Kabupaten Purworejo merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki permasalahan perkawinan anak. Penyebab perkawinan anak di Kecamatan Bruno karena budaya masyarakat dan kondisi sosial ekonomi yang rendah. Belum adanya partisipasi secara kelembagaan di masyarakat dan masyarakat hanya berpartisipasi melalui edukasi dalam forum pertemuan tingkat desa yang disisipi materi mengenai perkawinan anak, menjadi penyebab rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap perkawinan anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh budaya masyarakat dan kondisi sosial ekonomi terhadap partisipasi masyarakat. Metode yang digunakan adalah kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Budaya Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat. Kondisi Sosial Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat. Budaya Masyarakat dan Kondisi Sosial Ekonomi secara bersamaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat, akan tetapi tingkat hubungan yang diperoleh adalah rendah.

Kata Kunci: Budaya Masyarakat, Kondisi Sosial Ekonomi, Partisipasi Masyarakat

ABSTRACT

Purworejo Regency is one of the regencies in Central Java Province which has problems with child marriage. The causes of child marriage in Bruno District are due to the community's culture and low socio-economic conditions. There is no institutional participation in the community and the community only participates through education in village-level meeting forums which include material on child marriage, which is the reason for the low level of public knowledge of child marriage. The purpose of this study was to analyze the influence of community culture and socio-economic conditions on community participation. The method used is quantitative. The results of the study show that Community Culture has a positive and significant effect on community participation. Socio-economic conditions have a positive and significant effect on community participation. Community Culture and Socio-Economic Conditions simultaneously have a positive and significant effect on community participation, but the level of relationship obtained is low.

Key Words: Community Culture, Community Participation, Socio Economic Conditions

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan terkait perlindungan hak anak salah satunya adalah fenomena perkawinan anak. Perkawinan anak di Indonesia di atur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan batas minimal usia perkawinan di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Regulasi perkawinan anak di Indonesia tidak serta-merta memperbolehkan perkawinan anak. Orang tua yang akan menikahkan anaknya di bawah usia 19 tahun perlu mengajukan dispensasi kawin sebelum akhirnya diberi izin menikah.

Namun, upaya tersebut ternyata tidak mengurangi praktek perkawinan anak di Indonesia. Justru dengan adanya perubahan tersebut pengajuan dispensasi perkawinan anak di Indonesia meningkat drastis hingga lima kali lipat atau 513%. Pengajuan dispensasi kawin di Indonesia pada tahun 2019 sebesar 23.126 meningkat di tahun 2020 menjadi 64.211 (Databoks 2022; KOMNAS Perempuan 2021).

Perkawinan anak di Indonesia hampir terjadi di seluruh provinsi, dari 34 provinsi

terdapat 22 provinsi dengan angka proporsinya berada di atas angka rata-rata nasional. Data BPS mengenai proporsi perempuan usia 20-24 yang berstatus kawin sebelum usia 18 tahun menunjukkan beberapa provinsi besar di Pulau Jawa masuk dalam peringkat jumlah perkawinan anak tertinggi salah satunya adalah Provinsi Jawa Tengah dengan angka proporsi sebesar 9,75 persen (BPS, 2021). Padahal jika dilihat dari aspek geografis, budaya, dan sosio ekonominya, Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang cukup maju di Indonesia.

Salah satu wilayah yang memiliki angka perkawinan tinggi adalah Kabupaten Purworejo dengan jumlah 347 kasus. Kabupaten Purworejo dipilih karena Kabupaten Purworejo merupakan kabupaten dengan jumlah desa terbanyak di Jawa Tengah. Hal ini sejalan dengan pernyataan UNICEF dan penelitian yang dilakukan oleh Kumari & Shekhar (2023), yaitu anak perempuan di daerah pedesaan dua kali lebih mungkin untuk menikah sebelum berumur 18 tahun dibandingkan dengan anak perempuan dari daerah perkotaan, peluang perkawinan anak lebih tinggi di pedesaan. Hal ini perlu adanya pencegahan perkawinan anak sedari awal sebagai langkah preventif menekan angka

perkawinan anak dari berbagai *Stakeholder* karena Kabupaten Purworejo memiliki peluang besar mengalami perkawinan anak.

Partisipasi masyarakat terhadap pencegahan perkawinan anak di Kecamatan Bruno masih tergolong dalam jenis partisipasi pasif/manipulatif, yaitu keterlibatan masyarakat yang hanya sekedar diberi tahu apa yang sedang terjadi tanpa mempertimbangkan tanggapan dari masyarakat (Mardikanto & Soebiato, 2017: 88). Menurut informasi dari Plt BKKBN Kecamatan Bruno, Bapak Viandis, partisipasi masyarakat secara kelembagaan di masyarakat belum ada, masyarakat berpartisipasi melalui edukasi dalam forum pertemuan tingkat desa yang kemudian dalam forum tersebut dimasukkan materi dan pesan-pesan berkaitan dengan pendewasaan usia perkawinan anak.

Rendahnya Partisipasi Masyarakat di daerah-daerah dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Menurut Nurdin terdapat tiga aspek yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu ekonomi dilihat dari aspek tingkat pendapatan dan lapangan kerja masyarakat setempat, sosial budaya berkaitan dengan perbedaan sosial budaya yang berkembang di masyarakat, meliputi cara berfikir, sikap, kepercayaan, dan kebiasaan, serta geografi

berupa jarak dan letak tempat tinggal seseorang dari pusat perkotaan (Anderson et al., 2022).

Syamaun (2019: 85) menyatakan bahwa kebudayaan akan membentuk, memperkuat dan mengubah sikap perilaku individu maupun sosial. Artinya, pengaruh yang kuat dari nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat secara tidak langsung akan membentuk sikap masyarakat pula. Budaya masyarakat yang berkembang terkait dengan perkawinan anak di Kecamatan Bruno adalah adanya stigma "*Prawan Tua*", dimana anak yang sudah tidak bersekolah lebih cenderung memilih untuk menikah atau dinikahkan agar tidak menganggur di rumah, anjuran agama terkait usia menikah yang tepat adalah datangnya menstruasi pertama bagi anak perempuan, dan agar terhindar dari hal-hal negatif, seperti pergaulan bebas antara remaja laki-laki dan perempuan, kedekatan remaja laki-laki dan perempuan yang terlalu dekat, atau bahkan Kehamilan di luar nikah. Selain itu, budaya patriarki masyarakat berupa adanya anggapan bahwa seorang anak perempuan tidak perlu berpendidikan karena akan mengurus rumah tangga. Faktor lingkungan sekitar berupa tetangga atau teman yang telah menikah muda sehingga mendorong individu anak untuk cepat-cepat menikah

juga (Rafidah, et al., 2009; Mustahal, 2023; Lorinda et al, 2023).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anderson et al. (2022) menyatakan bahwa terdapat pengaruh budaya terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Provinsi Jambi, dimana indikator yang digunakan adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Penelitian oleh Pandebesie, Indrihastuti, dan Wilujeng (2019) juga menyatakan sosial budaya, berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam *Sustainable Forest Management*. Selain itu Rahman, Sididi, Yusriani (2020) pengetahuan dan sikap memiliki hubungan yang positif terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Aspek lainnya yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kondisi sosial ekonomi berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam suatu kelompok masyarakat beserta dengan hak dan kewajiban yang harus dijalankannya. Kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Bruno menjadi salah satu penyebab terjadinya perkawinan anak. Orang tua dengan tingkat pendidikan rendah beresiko 1,25 kali lebih besar untuk menikahkan anaknya pada usia kurang dari

20 tahun (Rafidah, et al., 2009; Mustahal, 2023). Rendahnya pendidikan orang tua memberikan anggapan bahwa anak perempuan tidak perlu bersekolah tinggi-tinggi dan lebih memilih melangsungkan pernikahan. Tingkat pendapatan orang tua yang rendah berkaitan dengan kemampuan orang tua dalam membiayai sekolah putra-putri mereka (Lorinda et al, 2023). Keterbatasan biaya pendidikan tersebut mengakibatkan putus sekolah sehingga mendorong orang tua untuk menikahkan anak mereka agar memiliki kesibukan (Lorinda et al., 2023). Pekerjaan orang tua juga berpengaruh terhadap perkawinan anak, orang tua yang tidak bekerja beresiko 1,48 kali lebih besar menikahkan anak mereka dibandingkan dengan orang tua yang bekerja (Rafidah et al, 2009).

Penelitian terdahulu oleh Anisa dan Juliannisa (2022) menyatakan bahwa tingkat pendapatan dan pekerjaan berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam Program Keluarga Berencana di Kota Bekasi. Penelitian yang dilakukan oleh Savari, Damaneh, dan Damaneh (2020) menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap *Sustainable Forest Management*. Dari penjelasan tersebut terdapat hubungan antara tingkat pendidikan, pekerjaan, dan tingkat

pendapatan. Orang tua dengan tingkat pendidikan dan pendapatan yang tinggi, serta memiliki pekerjaan menurunkan resiko terjadinya perkawinan anak. Oleh karena itu, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya tetapi kondisi sosial ekonomi yang dimiliki masyarakat. Menurut Mazmanian & Sabatier, kondisi sosial ekonomi menjadi tolok ukur mengenai tingkat pemahaman dan keterbukaan masyarakat terhadap program, masyarakat yang telah terbuka dan terdidik akan mudah menerima suatu program dibandingkan dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional.

Dari pernyataan di atas menyatakan bahwa budaya masyarakat dan kondisi sosial ekonomi berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat, namun terkait dengan perkawinan anak, budaya masyarakat dan kondisi sosial ekonomi merupakan faktor penyebab perkawinan anak yang paling dominan di Kecamatan Bruno. Hipotesis yang ditarik adalah:

H1 : Terdapat pengaruh antara Budaya Masyarakat (X1) terhadap Partisipasi Masyarakat (Y)

H2 : Terdapat pengaruh antara Kondisi Sosial Ekonomi (X2) terhadap Partisipasi Masyarakat (Y)

H3 : Terdapat pengaruh antara Budaya Masyarakat (X1) dan Kondisi Sosial Ekonomi (X2) terhadap Partisipasi Masyarakat (Y)

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Pengaruh Budaya Masyarakat dan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Perkawinan Anak di Kecamatan Bruno”**.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Adakah pengaruh Budaya Masyarakat terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pencegahan Perkawinan Anak di Kecamatan Bruno?
2. Adakah pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pencegahan Perkawinan Anak di Kecamatan Bruno?
3. Adakah pengaruh Budaya Masyarakat dan Kondisi Sosial Ekonomi terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pencegahan Perkawinan Anak di Kecamatan Bruno?

B. Kajian Teori Partisipasi Masyarakat

Keith Davis (1962) (dalam Sastropetro, 1985: 13) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan

keterlibatan mental dan emosional individu di dalam situasi kelompok yang mendorong untuk memberikan sumbangan untuk mencapai tujuan kelompok dan ikut bertanggung jawab terhadap usaha di dalamnya. Cohen dan Uphoff (1980) merumuskan partisipasi sebagai keterlibatan mental dan emosional individu maupun kelompok yang mendorong mereka untuk berkontribusi mewujudkan tujuan kelompok dan bertanggung jawab atas keberhasilan tersebut.

Dimensi Partisipasi Masyarakat

Indikator partisipasi masyarakat menurut Yadav (UNPADI, 1980) dalam (Mardikanto & Soebiato, 2017: 82) terdapat empat kegiatan yang menunjukkan sebuah partisipasi masyarakat dalam pembangunan, meliputi:

- a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan agar memungkinkan masyarakat dapat berpartisipasi langsung di dalam proses pengambilan keputusan sehingga terdapat pemerataan kebutuhan-kebutuhan masyarakat luas bukan hanya kelompok-kelompok kecil saja.

- b. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan diartikan sebagai keterlibatan masyarakat secara sukarela untuk menyumbangkan tenaga kerja, uang tunai, dan berbagai bentuk lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masyarakat tersebut.

- c. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan

Pada tahap pemantauan dan evaluasi pembangunan ataupun program kebijakan, partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk mengumpulkan informasi berkaitan dengan perkembangan kegiatan dan perilaku aparat pembangunan, sehingga tujuan pembangunan dan program dapat tercapai serta penanganan kendala-kendala yang ditemukan selama berjalannya pembangunan dan program kebijakan.

- d. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan

Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil pembangunan sangat diperlukan karena seringkali kurang mendapat perhatian pemerintah dan administrasi pembangunan. Partisipasi

masyarakat tersebut dimaksudkan agar terjadi pemerataan manfaat disetiap program pembangunan secara langsung.

Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Slamet (1985) dalam (Mardikanto & Soebiato, 2017: 91-94), tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan ditentukan oleh Kemampuan berpartisipasi, dari adanya kesempatan-kesempatan tersebut apabila masyarakat tidak memiliki kemampuan maka kesempatan tersebut tidaklah berarti. Kemampuan yang dimaksud meliputi: kemampuan untuk menemukan dan memahami kesempatan, kemampuan untuk melaksanakan pembangunan yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan keterampilan, dan kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Sedangkan Draiono dalam (Sanstropetro, 1986: 22) menyatakan bahwa faktor ideal yang menjamin keberhasilan suatu program dan tercapainya partisipasi masyarakat secara menyeluruh adalah dipengaruhi oleh aspek budaya, kebiasaan, tradisi, dan sistem nilai yang ada di masyarakat.

Budaya Masyarakat

Budaya atau *Budhayah* atau *Buddhi* dalam bahasa Sansekerta berarti budi dan

akal. Menurut E. B. Taylor (dalam Sihotang, 2005: 12), budaya merupakan suatu keseluruhan kompleks meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lainnya serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Sedangkan Syamaun (2019: 85) menyatakan bahwa kebudayaan dapat membentuk, memperkuat dan mengubah sikap dan perilaku baik secara individu maupun sosial (Anderson et al., 2022). Artinya, terdapat pengaruh yang kuat dari nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat di suatu lingkungan tertentu secara tidak langsung akan membentuk sikap masyarakat.

Indikator yang digunakan untuk mengukur Budaya Masyarakat adalah pengetahuan dan sikap. Dalam proses tranformasi budaya, akan terbentuk kognisi, yaitu pengertian, pengalaman, pengetahuan, pemahaman, kepercayaan, dan keyakinan yang selanjutnya akan diikuti oleh bentuk afeksi (perasaan), seperti senang, sedih, marah, takut, dll. Yang pada akhirnya akan membawa pada kesiapan untuk menerima atau menolak (sikap) (Syamaun, 2019: 85). Menurut Nurdin sosial budaya berkaitan dengan perbedaan sosial budaya yang berkembang di masyarakat, meliputi cara

berfikir, sikap, kepercayaan, dan kebiasaan (Anderson et al., 2022).

- a. Pengetahuan (*knowledge*) menurut Mubarak (2011) adalah segala sesuatu yang diketahui berdasarkan pada pengalaman seseorang dan akan bertambah sesuai dengan pengalaman yang dialaminya (Darsini et al., 2019). Pengetahuan merupakan aspek dominan yang mendasari tindakan seseorang dan pengetahuan dapat diukur menggunakan wawancara atau angket dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden berkaitan dengan isi materi yang akan diukur.
- b. Sikap (*attitude*) menurut Wegener & Carlston (2005) (dalam Sa'diyah et al., 2018) adalah penilaian (evaluasi) terhadap suatu objek misalnya orang, objek-objek, peraturan dan ide (gagasan) dan sebagainya. Sikap juga dapat diartikan sebagai kecenderungan seseorang atau individu mereaksi suatu hal, orang, ataupun benda dilingkungan sekitarnya dengan suka atau tidak suka, acuh atau tidak acuh, dan setuju atau tidak setuju (Rahman et al., 2020). Sikap yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pandangan atau tanggapan responden terhadap perkawinan anak.

Kondisi Sosial Ekonomi

Kondisi sosial ekonomi setiap individu berbeda-beda dan bertingkat ada yang rendah maupun tinggi. Sumardi (2001:21) dalam (Basrowi and Juariyah, 2010) menjelaskan kondisi sosial ekonomi merupakan sebuah kedudukan yang diatur secara sosial dan menempatkan seseorang di posisi tertentu dalam masyarakat.

Indikator yang digunakan untuk mengukur Kondisi Sosial Ekonomi adalah menurut Cohen dan Uphoff (1980), yaitu:

a. Tingkat Pendidikan

Pendidikan menurut Sumarto (2009: 122) merupakan suatu proses dimana kelompok-kelompok sosial mentransmisikan nilai-nilai kepada generasi selanjutnya. Indikator tingkat pendidikan yang diukur adalah tingkat pendidikan formal berdasarkan jenjang pendidikan sesuai dengan UU SISDIKNAS, yaitu

- a. pendidikan dasar (SD/MI/ Sederajat & SMP/MTs/Sederajat),
- b. pendidikan menengah (SMA/SMK/Sederajat),
- c. Pendidikan tinggi (diploma, sarjana, magister, spesialis dan doktor).

b. Jenis Pekerjaan

Pekerjaan merupakan aktivitas sosial, dimana individu atau kelompok melaksanakan upaya selama waktu dan ruang tertentu dengan mengharapkan imbalan dan penghargaan ataupun tanpa imbalan (Meisartika & Safrianto, 2021). Jenis pekerjaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menurut Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI) (2014), jenis pekerjaan diklasifikasikan sebagai berikut (ISCO-08, 2012):

- a. Tenaga profesional, teknis, dan sejenisnya, contohnya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), guru, dokter, dosen, dan lainnya.
- b. Tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan, contohnya adalah sekretaris, bagian administrasi, dan lainnya.
- c. Tenaga tata usaha dan sejenisnya, contohnya tata usaha perkantoran umum, tata usaha pelayanan pelanggan, dan lainnya.
- d. Tenaga usaha penjualan, contohnya penjual toko, *salesman*, dan lainnya
- e. Tenaga usaha jasa, contohnya tukang jahit, tukang cukur, sopir, dan lainnya
- f. Tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan, contohnya

adalah petani/pekebun, peternak, dan lainnya.

- g. Tenaga produksi, operator alat-alat angkutan, dan pekerja kasar, contohnya adalah pekerja pabrik, buruh pabrik, buruh kuli, dan lainnya
- h. Lainnya

c. Tingkat Pendapatan

Pendapatan menurut Raharja dan Manurung (2010) (dalam Iskandar, 2017) menyatakan bahwa pendapatan merupakan jumlah total penerimaan yang dapat berupa uang maupun bukan uang oleh seseorang atau rumah tangga tertentu selama rentang waktu tertentu. Menurut BPS, pendapatan digolongkan ke dalam 4 kategori, diantaranya:

- a. Golongan pendapatan sangat tinggi, yaitu dengan rata-rata pendapatan lebih dari >Rp. 3.500.000 per bulan
- b. Golongan pendapatan tinggi, yaitu dengan rata-rata pendapatan antara >Rp. 2.500.000 s/d Rp. 3.500.000 per bulan
- c. Golongan pendapatan sedang, yaitu dengan rata-rata pendapatan antara >Rp. 1.500.000 s/d Rp. 2.500.000 per bulan
- d. Golongan pendapatan rendah, yaitu dengan rata-rata pendapatan dibawah <Rp. 1.500.000 per bulan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatori. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Bruno, yaitu orang tua yang memiliki (putra/putri) yang menikah dini dengan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 30 responden. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel *Simple random sampling* berdasarkan pada teori menurut Gay, Mills dan Airasian (2009: 133) yang menyatakan untuk penelitian eksperimen dan komparatif diperlukan 30 responden untuk masing-masing kelompok. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan angket (kuisisioner) dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan statistik non-parametris dengan rumus Kendall Tau dan media yang digunakan adalah SPSS Versi 26.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Uji Validitas

Tabel 1 Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian

Item Pertanyaan	r Hitung	r Tabel	Ket.
Partisipasi Masyarakat (Y)			
1	0,605* *	0,361	Valid
2	0,677* *	0,361	Valid
3	0,589* *	0,361	Valid
4	0,722* *	0,361	Valid
5	0,507* *	0,361	Valid
6	0,689* *	0,361	Valid
7	0,516* *	0,361	Valid
Budaya Masyarakat (X1)			
8	0,678* *	0,361	Valid
9	0,659* *	0,361	Valid
10	0,512* *	0,361	Valid
11	0,623* *	0,361	Valid
12	0,502* *	0,361	Valid
13	0,460* *	0,361	Valid
14	0,491* *	0,361	Valid
15	0,392* *	0,361	Valid

Item Pertanyaan	r Hitung	r Tabel	Ket.
16	0,424* *	0,361	Valid
Kondisi Sosial Ekonomi (X2)			
17	0,619* *	0,361	Valid
18	0,827* *	0,361	Valid
19	0,447* *	0,361	Valid

2023

Berdasarkan data dalam tabel 1 dapat dilihat bahwa dari 19 pertanyaan utama yang akan digunakan untuk melaksanakan penelitian telah memenuhi syarat dan dikatakan valid. Hasil penghitungan uji validitas pada masing-masing pertanyaan dalam kuisioner tersebut, masing-masing telah memenuhi r hitung lebih besar daripada r tabel ($r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$), sehingga dapat dikatakan valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 2 Hasil Perhitungan Uji Reliabilitas

Variabel	Hasil	Batasan	Ket.
Partisipasi Masyarakat (Y)	0,835	0,70	Reliabel
Budaya Masyarakat (X1)	0,791	0,70	Reliabel
Kondisi SosEk (X2)	0,779	0,70	Reliabel

Dari Tabel 2 dapat diketahui bahwa ketiga variabel, yaitu Partisipasi Masyarakat (Y), Budaya Masyarakat (X1), dan Kondisi Sosial Ekonomi (X2) memiliki hasil nilai reliabilitas lebih tinggi daripada dengan batas nilai reliabilitas yang ditentukan, yaitu di atas 0,70. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel yang akan diujikan tersebut reliabel.

Uji Korelasi

Pengaruh Budaya Masyarakat Terhadap Partisipasi Masyarakat

Tabel 3 Hasil Pengujian Hubungan Variabel Budaya Masyarakat (X1) terhadap Partisipasi Masyarakat (Y)

		Partisipasi Masyarakat (Y)	Budaya Masyarakat (X1)
Kendall's tau_b	Partisipasi Masyarakat (Y)	Koefisien Korelasi	1,000
		Siginifikan	-
		N	30
	Budaya Masyarakat (X1)	Koefisien Korelasi	0,388*
		Siginifikan	0,031
		N	30

Sumber: Data Primer yang Diolah Peneliti, 2023

Hasil nilai koefisien korelasi yang diperoleh antara variabel Budaya Masyarakat (X1) terhadap Partisipasi Masyarakat (Y) sebesar 0,388 dan bernilai positif. Sedangkan, hasil nilai taraf signifikansi yang diperoleh antara variabel Budaya Masyarakat (X1) terhadap Partisipasi Masyarakat (Y) sebesar 0,031. Taraf signifikansi yang digunakan adalah 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa antara variabel Budaya Masyarakat (X1) terhadap Partisipasi Masyarakat (Y) terdapat hubungan yang signifikan ($0,031 < 0,05$). Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa antara Budaya Masyarakat (X1) terhadap Partisipasi Masyarakat (Y) terdapat hubungan yang positif dan signifikan.

Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Masyarakat

Tabel 4 Hasil Pengujian Hubungan Variabel Kondisi Sosial Ekonomi (X2) terhadap Partisipasi Masyarakat (Y)

			Partisipasi Masyarakat (Y)	Kondisi Sosial Ekonomi (X2)
Kendall's	Partisipasi	Koefisien Korelasi	1,000	0,386*

tau_b	Masyarakat (Y)	Siginifikasi	-	0,032
		N		30
	Kondisi Sosial Ekonomi (X2)	Koefisien Korelasi	0,386*	1,000
		Siginifikasi	0,032	-
	N	30	30	

Sumber: Data Primer yang Diolah Peneliti, 2023

Hasil nilai koefisien korelasi yang diperoleh antara variabel Kondisi Sosial Ekonomi (X2) terhadap Partisipasi Masyarakat (Y) sebesar 0,386 dan bernilai positif. Sedangkan, Hasil nilai taraf signifikansi yang diperoleh antara variabel Kondisi Sosial Ekonomi (X2) terhadap Partisipasi Masyarakat (Y) sebesar 0,032. Taraf signifikansi yang digunakan adalah 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa antara variabel Kondisi Sosial Ekonomi (X2) terhadap Partisipasi Masyarakat (Y) terdapat hubungan yang signifikan ($0,032 < 0,05$). Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa antara Kondisi Sosial Ekonomi (X2) terhadap Partisipasi Masyarakat (Y) terdapat hubungan yang positif dan signifikan.

Pengaruh Budaya Masyarakat dan Kondisi Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Masyarakat

Tabel 5 Hasil Perhitungan Pengaruh Budaya Masyarakat (X1) dan Kondisi Sosial Ekonomi (X2) Terhadap Partisipasi Masyarakat (Y)

N	30
Kendall's W	0,384
Chi-Square	23,053
df	2
Asymp. Sig.	0,000

Sumber: Data Primer yang Diolah Peneliti, 2023

Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,00	Sangat kuat

Sumber: Sugiyono, 2022: 274

Hasil nilai koefisien korelasi yang diperoleh antara variabel Budaya Masyarakat (X1) dan Kondisi Sosial Ekonomi (X2) terhadap Partisipasi Masyarakat (Y) sebesar 0,384. Berdasarkan perhitungan dengan skala Kendall-Tau dapat diketahui bahwa hipotesis dapat dikatakan memiliki hubungan yang kuat apabila hasil perhitungan lebih dari 0,60 – 0,799. Namun, pada penelitian ini tingkat hubungan yang

didapat adalah rendah. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang rendah antara variabel Budaya Masyarakat (X1) dan Kondisi Sosial Ekonomi (X2) terhadap Partisipasi Masyarakat (Y).

Hasil nilai taraf signifikansi yang diperoleh antara variabel Budaya Masyarakat (X1) dan Kondisi Sosial Ekonomi (X2) terhadap Partisipasi Masyarakat (Y) sebesar 0,000. Taraf signifikansi yang digunakan adalah 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa antara variabel Budaya Masyarakat (X1) dan Kondisi Sosial Ekonomi (X2) terhadap Partisipasi Masyarakat (Y) terdapat hubungan yang signifikan ($0,000 < 0,05$). Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa antara variabel Budaya Masyarakat (X1) dan Kondisi Sosial Ekonomi (X2) terhadap Partisipasi Masyarakat (Y) terdapat hubungan yang positif dan signifikan tetapi memiliki tingkat hubungan yang rendah.

PEMBAHASAN

Pengaruh Budaya Masyarakat Terhadap Partisipasi Masyarakat

Hasil analisis menyatakan Budaya Masyarakat (X1) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Partisipasi

Masyarakat (Y). Hasil perhitungan korelasi yang diperoleh adalah 0,388 yang mana hasil tersebut menunjukkan memiliki tingkat hubungan rendah, sehingga pengaruh antara Budaya Masyarakat (X1) terhadap Partisipasi Masyarakat bersifat lemah. Temuan ini sesuai dengan teori menurut Darjono dalam (Sastropetro, 1986: 22) yang menyatakan bahwa faktor ideal yang menjamin keberhasilan suatu program dan tercapainya partisipasi masyarakat secara menyeluruh adalah dipengaruhi oleh aspek budaya, kebiasaan, tradisi, dan sistem nilai yang ada di masyarakat. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Savari et al. (2020) yang menyatakan bahwa faktor sosial budaya memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap keterlibatan dalam pengelolaan hutan berkelanjutan. Sedangkan penelitian menurut Anderson et al. (2022) menyatakan bahwa budaya dengan indikator pengukuran berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan masyarakat memiliki pengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Provinsi Jambi. Menurut Anderson et al., jika budaya masyarakat baik, maka partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan meningkat.

Dari hasil perhitungan dan temuan menyatakan bahwa budaya masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pencegahan perkawinan anak. Terdapat temuan di lapangan bahwa sebagian besar masyarakat mengetahui terkait perkawinan anak dan batas minimal usia menikah sesuai dengan regulasi ketika mendaftar perkawinan untuk anaknya di KUA. Selain itu, masyarakat cenderung setuju dengan stigma terkait anak perempuan yang berhak untuk mendapatkan pendidikan. Namun, mereka juga setuju apabila anak lebih baik dinikahkan lebih cepat untuk menghindari hal-hal negatif dan zina. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, seperti kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak yang telah memiliki teman lawan jenis dan keinginan anak untuk menikah sehingga orang tua tidak mampu menolaknya.

Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Masyarakat

Temuan ini sesuai dengan teori menurut Darjono (dalam Sastropetro, 1986:22) yang menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah pendidikan, kemampuan membaca dan menulis, kemiskinan, kedudukan sosial,

dan kepercayaan diri. Selain itu menurut, Cohen dan Uphoff (1980) menyatakan bahwa latar belakang individu yang mendukung terjadinya partisipasi masyarakat dilihat dari usia dan jenis kelamin, status keluarga, tingkat pendidikan, pembagian sosial, pekerjaan, tingkat pendapatan, lama tinggal dan jarak, dan status kepemilikan tanah. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu, yaitu penelitian dilakukan oleh Anisa & Juliannisa (2022) menyatakan bahwa tingkat pendapatan dan pekerjaan memiliki pengaruh terhadap partisipasi pada program KB. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Savari et al. (2020) menyatakan bahwa faktor yang berpengaruh signifikan terhadap keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan berkelanjutan adalah tingkat pendidikan.

Dari hasil perhitungan dan temuan menyatakan bahwa kondisi sosial ekonomi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pencegahan perkawinan anak. Terdapat temuan di lapangan bahwa masyarakat mayoritas memiliki tingkat ekonomi yang rendah. Menurut jawaban dari beberapa responden menyatakan bahwa alasan mereka tidak ikut terlibat dalam suatu kegiatan di masyarakat salah satunya karena faktor kesibukan bekerja. Mayoritas

masyarakat di Kecamatan Bruno mengenyam pendidikan formal meskipun beberapa ada yang tidak lulus Sekolah Dasar. Secara ekonomi, masyarakat di Kecamatan Bruno bergantung pada hasil pertanian dan perkebunan dengan mayoritas upah yang didapat kurang dari Rp. 1.500.000 atau tergolong upah yang rendah.

Pengaruh Budaya Masyarakat dan Kondisi Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Masyarakat

Temuan ini sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa suatu program akan kebijakan perlu menyesuaikan budaya dan kondisi sosial ekonomi yang ada di masyarakat (Sastropetro, 1986: 21; Sumarto, 2003: 153). Temuan ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu, menurut Savari et al. (2020) yang menyatakan bahwa terdapat faktor yang mempengaruhi keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan berkelanjutan diantaranya adalah faktor pribadi meliputi tingkat pendidikan, faktor sosial budaya, dan faktor dukungan ekonomi. Temuan Savari et al menyatakan bahwa faktor tersebut dapat diterima sebesar 70% dari total varians yang ada, artinya faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap keterlibatan pengelolaan hutan berkelanjutan daripada faktor yang lainnya.

Keberhasilan dari sebuah budaya masyarakat adalah terciptanya budaya masyarakat yang baik berupa pengetahuan dan sikap yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku, serta memperhatikan hak-hak manusia di dalamnya. Dalam partisipasi masyarakat, masyarakat perlu memiliki pemahaman terhadap partisipasi, seperti kemampuan untuk memahami kesempatan berpartisipasi dan kemampuan memecahkan masalah dan kemampuan tersebut dipengaruhi oleh pendidikan dan keterampilan masyarakat (Mardikanto & Soebiato, 2017: 93). Selain itu, mereka yang berpartisipasi dengan kondisi sosial ekonomi yang rendah cenderung lebih memilih berpartisipasi melalui tenaga, dalam temuan dilapangan menyatakan bahwa mereka bersedia datang ikut terlibat dalam kegiatan pemerintah apabila diundang. Namun, terdapat masyarakat yang enggan datang karena kesibukan bekerja, seperti berdagang dan bertani.

KESIMPULAN

1. Terdapat pengaruh antara variabel Budaya Masyarakat (X1) terhadap variabel Partisipasi Masyarakat (Y). Berdasarkan hasil perhitungan menyatakan nilai koefisien korelasi yang diperoleh sebesar 0,388 dengan nilai taraf

signifikansinya adalah 0,031. Artinya terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel Budaya Masyarakat dan variabel Partisipasi Masyarakat.

2. Terdapat pengaruh antara variabel Kondisi Sosial Ekonomi (X2) dan Partisipasi Masyarakat (Y). Berdasarkan hasil perhitungan menyatakan nilai koefisien korelasi yang diperoleh sebesar 0,386 dengan nilai taraf significansinya adalah 0,032. Artinya terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel Kondisi Sosial Ekonomi dan variabel Partisipasi Masyarakat.
3. Terdapat pengaruh antara variabel Budaya Masyarakat (X1) dan variabel Kondisi Sosial Ekonomi (X2) secara bersama-sama terhadap variabel Partisipasi Masyarakat. Berdasarkan hasil perhitungan menyatakan nilai koefisien korelasi yang diperoleh sebesar 0,384 dengan nilai taraf significansi adalah 0,000. Artinya variabel Budaya Masyarakat dan Kondisi Sosial Ekonomi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel Partisipasi Masyarakat.

SARAN

1. KUA dapat menambah jangkauan dan menjadwalkan program pencegahan

perkawinan anak kepada desa-desa lainnya serta menjadwalkannya secara bergilir. KUA dapat berkolaborasi dengan pemerintah desa dan *stakeholder* luar, seperti akademisi atau psikolog/ahli maupun puskesmas setempat yang dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang perkawinan anak dan kesehatan reproduksi. Selain itu, KUA dan pemerintah desa perlu memperhatikan sasaran program pencegahan perkawinan anak, yaitu orang tua yang memiliki anak remaja.

2. Edukasi kepada anak remaja dapat dilakukan dengan berkolaborasi dengan berbagai *stakeholder*, seperti sekolah, tokoh masyarakat, dan seseorang yang ahli dibidang kesehatan anak dan remaja. Diberikan edukasi dengan menjadwalkan edukasi dan materi-materi yang diberikan. Selain itu, pihak sekolah dapat mengencarkan pelajaran Pendidikan Kewirausahaan (PKWU) agar sang anak dapat memiliki bekal keterampilan yang berguna bagi kehidupan di masa mendatang.
3. Monitoring dari sesama masyarakat agar penerapan manfaat yang diperoleh tersebut dapat terlaksana dengan baik. Monitoring dapat dilakukan melalui edukasi perkawinan anak kepada kader-

kader di desa yang nantinya diberikan tugas memberikan pendekatan secara kekeluargaan kepada masyarakat lainnya melalui berbagai kegiatan, seperti arisan, dasawisma, PKK, atau Posyandu.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Buku
Dwiningrum, S. I. A. (2011). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Pustaka Belajar.
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
file:///C:/Users/ASUS/Downloads/BukuMetodePenelitianKualitatifKuantitatif.pdf
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Ndraha, T. (1987). *Pembangunan Masyarakat-Mempersiapkan Masyarakat Tingkat Landas*. Bina Aksara.
- Sastropoetro, S. (1986). *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Offset Alumni.
- Sugiyono. (2007). *Statistika untuk Penelitian*. Alfabeta.
- Tjokroamidjojo, B. (1995). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. LP3ES.
- Jurnal
Anderson, I., Kuswanto, & Apipah. (2022).

- The Role of Social Media and Community Culture and Their Effect on Community Participation in Village Development in Jambi Province. *Journal of Moral and Civic Education*, 6(1), 159–169.
- Anisa, R., & Juliannisa, I. A. (2022). Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Dalam Program Keluarga Berencana Di Kota Bekasi. *Jurnal Ikraith-Ekonomika*, 5(3), 168–179. <http://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKRAITH-EKONOMIKA>
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1980). Participation's place in rural development: Seeking clarity through specificity. *World Development*, 8(3), 213–235.
- Mustahal, M. (2023). Penyuluhan Pra Nikah Dalam Perspektif Islam: Upaya Meningkatkan Pengetahuan Tentang Pernikahan Pada Daerah Rawan Perceraian. *Abdi Kami*, 6(1), 92–102. http://ejournal.iaiiibrahimy.ac.id/index.php/Abdi_Kami
- Pandebesie, E. S., Indrihastuti, I., & Wilujeng, S. A. (2019). Factors Influencing Community Participation In The Management of Household Electronic Waste in West Surabaya, Indonesia. *Enironmental Science and Pollution Research*, 26, 27930–27939. <https://doi.org/10.1007/s11356-019-05812-9>
- Rahman, Sididi, M., & Yusriani. (2020). Pengaruh Pengetahuan dan Sikap Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah. *Jurnal Surya Muda*, 2(2), 119–131. <https://doi.org/10.38102/jsm.v2i2.70>
- Savari, M., Damaneh, H. E., & Damaneh, H. E. (2020). Factors influencing local people's participation in sustainable forest management. *Arabian Journal of Geosciences*, 13(513). <https://link-springer-com.proxy.undip.ac.id/article/10.1007/s12517-020-05519-z>
- Syamaun, S. (2019). Pengaruh Budaya Terhadap Sikap dan Perilaku Keberagaman. *At-Taujih*, 2(2), 81–95. <http://dx.doi.org/10.22373/taujih.v2i2.6490>